WARTA KOTA

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dana Hibah Pemprov DKI

Rahmat Effendi Yakin Hibah Bakal Cair

PEMERINTAH Kota Bekasi mengklaim telah mengajukan rencana penggunaan dana hibah tahun 2015 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tiga bulan lalu.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, secara keseluruhan dana hibah yang akan diberikan DKI Jakarta ke Pemkot Bekasi mencapai Rp 200 miliar. Namun dari jumlah tersebut, baru Rp 98 miliar saja yang perincian anggarannya sudah dilayangkan ke DKI Jakarta. Adapun uang sebanyak Rp 98 miliar itu difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang ditangani oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.

"Rincian pengajuannya akan digunakan untuk pelebaran Jalan KH Noer Ali yang menelan biaya sekitar Rp 60 miliar, pelebaran jembatan Jalan Joyomartono sekitar Rp 30 miliar," ujar Rahmat pada Minggu (8/2).

Rahmat menjelaskan, secara keseluruhan dana hibah sebesar Rp 200 miliar itu akan digunakan untuk beberapa pembangunan lain di bidang infrastruktur jalan hingga normalisasi saluran air. Misalnya, pembuatan kolam retensi di Perumahan Pondokgede Permai (PGP) senilai Rp 20 miliar, hingga perbaikan jalan di sekitar perempatan Pasar Rebo senilai Rp 9 miliar.

Rahmat pun menambahkan, bila pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta belum menerima rincian anggaran yang diserahkan, kemungkinan pengajuan dana hibah baru sampai di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Diaudit BPK

Terkait isu adanya penundaan pencairan dana hibah pada tahun ini yang disebabkan belum dilampirkannya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun lalu, Rahmat pun menanggapinya enteng. Ia yakin dana hibah akan tetap cair pada tahun 2015 ini.

"Isu ini kan keluar dari seorang staf pemerintahan jadi belum tentu benar. Akan tetapi, kalau keluar langsung dari mulut bapak Ahok (Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama) baru saya percaya," kata Rahmat.

Pemberian bantuan tersebut adalah hasil perundingan antarpemerintah daerah, maka harus gubernur atau DPRD sendiri yang menyampaikan.

Rahmat mengatakan, setiap enam bulan penggunaan dana hibah DKI 2014 sebesar Rp 3 miliar selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia pun, yakin tidak ada penyimpangan dari penggunaan dana tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Dicky Irawan mengungkapkan, mepetnya waktu pencairan dana hibah membuat pihaknya agak terlambat membuat LPJ. Menurut Dicky, pencairan dana hibah terjadi pada November 2014. Oleh sebab itu, pihaknya hanya mampu mengerjakan 18 proyek dalam waktu 25 hari.

Bila melihat dari besaran bantuan saat itu, kata Dicky, sebetulnya sangat kurang untuk menormalisasi sejumlah saluran. Meski demikian, ia tak mampu berbuat banyak, sebab pemberian dana hibah itu adalah hak dari DKI Jakarta. **(faf)**

dok. Warta Kota/ichwan chasani

BANGUNAN LIAR - Kegiatan pembongkaran bangunan liar yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bekasi, di sisi utara Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, beberapa waktu lalu. Pemkot Bekasi akan menggunakan dana hibah untuk antara lain memperlancar akses ke wilayah Jakarta.